

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah.
2. Pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah.
3. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah.
4. Opini audit tidak berpengaruh terhadap keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data penelitian dilakukan pada akhir tahun 2022 sampai awal tahun 2023. Data yang digunakan dalam keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah antara lain komponen LKPD (Neraca, LRA, LAK dan CALK) dan APBD tahun 2021. Pada waktu dilakukan pencarian data penelitian, beberapa pemerintah kabupaten dan kota sudah tidak menyediakan APBD tahun 2021, yang tersedia APBD

tahun 2022 bahkan ada beberapa pemerintah kabupaten dan kota yang sudah menyediakan APBD tahun 2023. Oleh sebab itu, peneliti memberikan nilai 0 untuk indikator jika terdapat komponen APBD pada keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah sebab sudah tidak ada APBD tahun 2021.

2. Ketika mengakses website pemerintah kabupaten dan kota dipengaruhi oleh jaringan internet. Ketika jaringan internet terganggu, website sulit diakses tetapi ketika jaringan internet tidak terganggu, website bisa diakses. Peneliti berusaha mencoba mengakses kembali beberapa kali website pemerintah kabupaten dan kota bahkan juga pada hari yang berbeda. Hal ini memungkinkan berkurangnya sampel penelitian jika website pemerintah daerah tidak dapat diakses. Dapat juga menyebabkan pemberian nilai keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah akan berbeda dengan penelitian sebelumnya.
3. Ada data jumlah penduduk kabupaten dan kota tahun 2021 yang diperoleh dari laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) tahun 2021. Ada pula data jumlah penduduk kabupaten dan kota tahun 2021 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), namun ada beberapa data jumlah penduduk kabupaten dan kota tahun 2021 yang disediakan BPS merupakan data proyeksi interim sensus penduduk 2020.
4. Tidak semua komponen laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan APBD terdapat di menu

transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sebagai contoh, Kabupaten Gorontalo mempublikasikan komponen laporan keuangan pada menu IPKD. Kabupaten Bone mempublikasikan komponen laporan keuangan pada menu informasi kemudian pilih keuangan. Kota Jambi mempublikasikan komponen laporan keuangan pada menu PPID lalu pilih informasi berkala. Ketika membuka website pemerintah daerah tidak teliti maka dapat menyebabkan penilaian mengenai keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah menjadi tidak tepat.

5. Ada 8 data total aset, total utang dan total ekuitas tahun 2021 yang diperoleh dari pencarian di google dikarenakan website pemerintah daerah belum mempublikasikan neraca tahun 2021. Hasil ini dikarenakan tidak ditemukannya neraca pada website pemerintah daerah. Sebagai contoh Kabupaten Kepulauan Mentawai. Peneliti mencoba mencari di google dengan mengetik neraca Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2021. Ditemukanlah neraca pada pencarian google dan ketika di klik muncul link <https://sumbar.bpk.go.id/rangkiang-data/uploads/filekeuangan/Kabupaten%20kepulauan%20Mentawai/file2021Kabupaten%20kepulauan%20Mentawai.pdf>. Peneliti tetap menjadikan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai sampel penelitian karena diperoleh data total aset, total utang dan total ekuitas tahun 2021 walaupun pada indikator terdapat komponen LKPD (Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)) pada variabel keteraksesan *Internet Financial*

Reporting (IFR) diberi nilai 0 karena di website Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak menyediakan komponen LKPD (Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)).

5.3. Saran

Saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya berdasarkan keterbatasan penelitian:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan mempertimbangkan periode penelitian sehingga tidak ditemukan kendala sudah tidak tersedia APBD sesuai periode penelitian karena website pemerintah daerah sudah mengunggah APBD tahun terbaru. Selain itu juga diperoleh data jumlah penduduk yang sesungguhnya, bukan data proyeksi.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan membuka website pemerintah daerah tidak hanya satu kali. Tetapi berulang-ulang atau mencoba membuka kembali pada hari yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan jaringan internet mempengaruhi akses website pemerintah daerah.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan ketika mencari data mengenai komponen LKPD dan APBD tidak hanya pada menu transparasi. Peneliti selanjutnya diharapkan dengan teliti membuka semua menu yang ada di website kabupaten dan kota pemerintah daerah sehingga diperoleh komponen LKPD dan APBD. Dari pencarian data yang sudah dilakukan peneliti, kebanyakan komponen LKPD dan APBD diperoleh pada menu PPID.

4. Ketika peneliti selanjutnya mencari data mengenai total aset, total utang dan total ekuitas pemerintah daerah kabupaten dan kota, tidak hanya mengandalkan data dari website pemerintah daerah. Peneliti dapat mencari pada pencarian google.
5. Bagi pihak pemerintah daerah, diharapkan memberikan informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah agar masyarakat dapat melihat kinerja pemerintah daerah walaupun sudah ada hasil pemeriksaan dari BPK.



DAFTAR PUSTAKA

- Dewi., S.A.N.K. dan A. Purwanto. 2022. Analisis Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kualitas Lkpd, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*. Volume 11. Nomor 2. Halaman 1-15.
- Ghozali. Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan IV. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Hadianto dan Murtin. 2022. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) di Indonesia. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*. Volume 4. Nomor 2.
- Hanum., N. dan S. Sarlia. 2019. Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Konsumsi di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*. Volume 3. Nomor 1.
- Hardiningsih, P., C. Srimindarti., A. Jannah dan M.Y.D. Haryanto. 2021. Digitalisasi Publikasi Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*. Volume 9. Nomor 1. Halaman 132-146.
- Hartono, J. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman Pengalaman*. BPFE. Yogyakarta, Indonesia.
- Khasanah., I.N, I. Yuhertiana dan G. Setyo B. 2017. Determinan Aksesibilitas *Internet Financial Reporting* (IFR) Pemerintah Ibu Kota Propinsi di Indonesia. *Symposium Nasional Akuntansi XX*. Jember
- Kurniawan, C.H. dan L.N.K. Scorpianti. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Keteraksesan *Internet Financial Reporting* Oleh Pemerintah Daerah di Indonesia. *Modus*. Volume 31. Nomor 2. Halaman 2549-3787.
- Kusumawardani, M. 2012. Pengaruh *Size*, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*. Volume 1. Nomor 1.
- Moehardiono., I.A. dan A. Yuliaty. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit Terhadap *Internet Financial Reporting* Pemerintah Kota/Kabupaten Jawa Timur. *JIMAT (Jurnal Ilmiah*

Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 12. Nomor 03.

Nufus, S.R.H., Titiek H. dan B. Santoso. 2019. Pengaruh ukuran Pemda, *leverage* dan kinerja Keuangan terhadap *IFR* pada Pemda dengan Dimoderasi Opini Audit. *e-Jurnal Akuntansi*. Volume 29. Nomor 3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Perdana., P.P. dan K. Achmad. 2018. Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah, Kompetisi Politik, Opini Audit dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Aksesibilitas *Internet Financial Reporting (IFR)* Pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Volume 7. Nomor 1.

Puspita., R. dan D. Martani. 2012. Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi*. Volume 15.

Putra., A.A.A. dan E. Syofyan. 2020. Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pendapatan Per Kapita Dan *Leverage* Terhadap Keteraksesan *Internet Financial Report* Oleh Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Volume 2. Nomor 1. Halaman 2020-2034.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022

Sari., I.P. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, *Leverage*, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra. *JOM Fekon*. Volume 3. Nomor 1.

- Setyaningrum., D. dan F. Syafitri. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Volume 9. Nomor 2
- Styles., A.K. dan M. Tennyson. 2007. The Accessibility of Financial Reporting of U.S. Municipalities on The Internet. *J. of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. 19 (1).Page 56-92
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Keempatbelas. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sukri, F. 2017. Persepsi Pemakai Laporan Keuangan Terhadap Independensi Auditor BPK di Kota Palu. *e Jurnal Katalogis*. Volume 5. Nomor 4. Halaman 21-32.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Verawaty. 2015. Determinan Aksesibilitas *Internet Financial Reporting* Melalui *E-Government* Pemerintah Daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi* 25. Kendari.
- Wau, I. dan Ratmono. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Keteraksesan *Internet Financial Reporting* oleh Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*. Volume 4. Nomor 4. Halaman 1-2.
- Zulva., I.I., A. Susbiyani dan D. Probowulan. 2018. *Determinan Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah Melalui e-Government Pemerintah Daerah di Jawa Timur*. Universitas Muhammadiyah Jember.